

# **Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur di Indonesia**

**Aditya Permana Aji 161102070051, Saintek, Teknik Industri**

## **Abstrak**

Salah satu penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari sektor industri manufaktur. Industri manufaktur sendiri juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Terdapat suatu kekhawatiran terhadap semakin meningkatnya penurunan output manufaktur di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, meskipun saat ini otoritas moneter sudah mulai melakukan beberapa strategi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi industri dan pemanfaatan kapasitas sektor. Karenanya, diperlukan perhatian yang lebih dari pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian *money supply* sehingga dapat meningkatkan output sektor industri di Indonesia. Walaupun pengaruh tingkat suku bunga terhadap PDB manufaktur tidak terlalu besar, pemerintah dan Bank Indonesia juga tetap perlu menekan tingkat suku bunga yang dapat mendorong investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci :** Kebijakan Moneter, Industri Manufaktur

## **A. Pendahuluan**

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997/1998 menunjukkan bahwa ternyata selama pemerintahan orde baru, sektor industri manufaktur telah berkembang secara tidak sehat. Meskipun laju pertumbuhan outputnya rata-rata positif setiap tahun, namun sektor tersebut sangat bergantung pada impor, khususnya untuk barang-barang modal dan bahan baku yang telah diolah. Kebijakan substitusi impor sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor barang-barang manufaktur. Di sisi lain, ekspor manufaktur Indonesia belum berkembang baik. Hal ini dapat dilihat pada tingkat diversifikasi produk-produk ekspor yang masih rendah dan sebagian besar masih berasal dari kategori teknologi menengah dan rendah.<sup>1</sup> Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama bagi sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja utama dan sektor manufaktur yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut catatan *World Economic Forum* (WEF) tahun 2019, posisi daya saing Indonesia masih berada pada urutan ke-50 dari 141 negara yang diteliti. Posisi ini menurun dibandingkan posisi pada tahun sebelumnya yaitu ke-45, posisi ini membuat Indonesia menjadi posisi terendah. Rendahnya posisi daya saing Indonesia disebabkan

oleh beberapa faktor. Pada tataran makro, terdapat tiga faktor, yaitu (a) tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro, (b) buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan, dan (c) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas. Sementara itu pada tataran mikro atau tataran bisnis, dua faktor yang menonjol adalah (a) rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasionalisasi perusahaan dan (b) lemahnya iklim persaingan usaha.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut catatan *International Institute for Management Development* (IMD), rendahnya kondisi daya saing Indonesia, disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian nasional dalam empat hal pokok, yaitu (a) buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga, (b) buruknya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih, dan kompleksitas struktur sosialnya, (c) lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari tingkat produktivitasnya yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumber daya keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional, dan (d) keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi, dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.<sup>3</sup>

Data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan investasi Indonesia tumbuh cukup signifikan pada Oktober - Desember tahun 2019, dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki jumlah nilai investasi senilai 102.975,6 (Rp miliar) dengan sektor transportasi, Gudang dan Telekomunikasi menjadi yang tertinggi memiliki 705 proyek dengan nilai investasi 23.510,1 (Rp Miliar)

**Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor  
Periode Oktober - Desember (TW IV) 2019**

| No.          | Sektor  | 2019          |                             |
|--------------|---|---------------|-----------------------------|
|              |   | Proyek        | Nilai investasi (Rp Miliar) |
| 1            | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi   | 705           | 23.510,1                    |
| 2            | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran   | 961           | 14.146,6                    |
| 3            | Industri Makanan  | 1.235         | 10.216,1                    |
| 4            | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan  | 881           | 10.036,5                    |
| 5            | Konstruksi  | 965           | 8.108,2                     |
| 6            | Listrik, Gas dan Air  | 409           | 7.688,4                     |
| 7            | Jasa Lainnya  | 1.700         | 7.507,6                     |
| 8            | Pertambangan  | 467           | 4.540,5                     |
| 9            | Hotel dan Restoran  | 967           | 4.035,4                     |
| 10           | Perdagangan dan Reparasi  | 4.731         | 3.190,6                     |
| 11           | Industri Kimia Dan Farmasi  | 494           | 2.689,8                     |
| 12           | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain                                      | 132           | 1.676,6                     |
| 13           | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya                            | 325           | 1.425,5                     |
| 14           | Industri Mineral Non Logam  | 196           | 812,3                       |
| 15           | Industri Kertas dan Percetakan  | 250           | 752,7                       |
| 16           | Industri Lainnya  | 245           | 703,7                       |
| 17           | Industri Karet dan Plastik  | 409           | 679,2                       |
| 18           | Kehutanan   | 68            | 324,4                       |
| 19           | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 206           | 305,5                       |
| 20           | Industri Tekstil  | 333           | 290,9                       |
| 21           | Industri Kayu   | 177           | 257,4                       |
| 22           | Perikanan   | 68            | 44,2                        |
| 23           | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki  | 44            | 33,5                        |
| <b>Total</b> |   | <b>15.968</b> | <b>102.975,6</b>            |

(gambar tabel data investasi PMDN,sumber Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019)

Dan Penanaman Modal Asing memiliki jumlah nilai investasi senilai 7.020,7 (Rp Miliar) dengan 13.142 Proyek dan sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi yang tertinggi dengan 463 Proyek dan nilai Investasi 1.501,9

**Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor  
Periode Oktober - Desember (TW IV) 2019**

| No.          | Sektor  | 2019          |                             |
|--------------|---|---------------|-----------------------------|
|              |   | Proyek        | Nilai Investasi (US\$ Juta) |
| 1            | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya                            | 463           | 1.501,9                     |
| 2            | Listrik, Gas dan Air  | 259           | 1.490,3                     |
| 3            | Pertambangan  | 354           | 683,7                       |
| 4            | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran   | 527           | 635,8                       |
| 5            | Industri Kimia Dan Farmasi  | 635           | 465,5                       |
| 6            | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi   | 356           | 293,5                       |
| 7            | Industri Makanan  | 1.045         | 269,4                       |
| 8            | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain                                      | 509           | 256,9                       |
| 9            | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 525           | 217,8                       |
| 10           | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan  | 502           | 215,3                       |
| 11           | Industri Mineral Non Logam  | 122           | 200,5                       |
| 12           | Jasa Lainnya  | 1.950         | 186,4                       |
| 13           | Hotel dan Restoran  | 1.494         | 114,9                       |
| 14           | Industri Lainnya  | 348           | 92,6                        |
| 15           | Perdagangan dan Reparasi  | 2.499         | 86,1                        |
| 16           | Industri Tekstil  | 452           | 73,1                        |
| 17           | Industri Kayu   | 133           | 48,1                        |
| 18           | Industri Kertas dan Percetakan  | 170           | 44,7                        |
| 19           | Industri Karet dan Plastik  | 361           | 43,0                        |
| 20           | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki  | 148           | 39,4                        |
| 21           | Konstruksi  | 147           | 35,9                        |
| 22           | Kehutanan   | 52            | 14,2                        |
| 23           | Perikanan   | 91            | 11,8                        |
| <b>Total</b> |   | <b>13.142</b> | <b>7.020,7</b>              |

(gambar tabel data investasi PMDN,sumber Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2019)

Apabila diteliti lebih jauh, investasi manufaktur yang berasal dari dalam negeri tumbuh sangat rendah, hanya sebesar 0,5 persen, dan investasi manufaktur dari mancanegara tumbuh 144,6 persen, atau tumbuh di atas pertumbuhan PMA nasional. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa di tengah kondisi perekonomian yang menurun ternyata investasi pada sektor industri manufaktur masih cukup menjanjikan, terutama untuk PMA. Empat industri manufaktur yang masih diminati investor dengan proporsi investasinya yang besar, yaitu (1) industri logam, mesin, dan elektronik, (2) industri kendaraan bermotor, (3) industri makanan, dan (4) industri kimia dan farmasi.<sup>4</sup>

Berdasarkan data pertumbuhan industri manufaktur Indonesia tahun 2001-2012, terlihat sejak tahun 2005 pertumbuhan sektor ini selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan rata-rata sebesar 4,5 persen. Pertumbuhan industri manufaktur yang terendah terjadi saat krisis finansial tahun 2009, dengan tumbuh hanya sebesar 2,21 persen. Barulah dua tahun kemudian sektor manufaktur dapat pulih kembali dan tumbuh sebesar 6,14 persen.<sup>5</sup>

Yang menarik adalah *gap* antara pertumbuhan ekonomi nasional dan sektor manufaktur semakin mengecil sejak tahun 2011, menyisakan hanya sedikit perbedaan. Bahkan Bank Indonesia memperkirakan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sektor manufaktur berada pada kisaran yang sama yaitu, 5,5-5,9 persen. Semakin menurunnya *gap* dari pertumbuhan sektor industri manufaktur dan pertumbuhan ekonomi nasional ini didukung oleh pertumbuhan beberapa industri manufaktur yang melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Selama tahun 2001-2012, misalnya, ekonomi nasional tumbuh 5,4 persen dan beberapa industri manufaktur tumbuh di atasnya, seperti industri peralatan, mesin, dan perlengkapan transportasi (10,1 persen) dan industri produk pupuk, kimia, dan karet (5,7 persen). Pertumbuhan kedua sektor industri manufaktur ini didukung juga oleh proporsi investasi yang besar, terutama PMA. Namun, ada juga sektor manufaktur yang menjadi penghambat pertumbuhan manufaktur nasional karena pertumbuhannya negatif, yaitu industri migas (-1,5 persen) dan industri kayu (-0,6 persen).<sup>5</sup>

Sementara itu, dua industri dengan proporsi investasi yang besar dan tumbuh di atas nasional adalah industri yang memiliki tingkat ketergantungan impor bahan baku yang cukup tinggi. Berdasarkan data industri manufaktur tahun 2011, industri kimia dan kimia lainnya besaran impor untuk bahan baku industrinya masing-masing sebesar 49,8 persen dan 60,8 persen. Sedangkan untuk manufaktur komponen kendaraan, tingkat ketergantungan impornya mencapai sebesar 51,3 persen, meningkat dari tahun 2007 sebesar 46,6 persen. Industri yang berhasil menurunkan ketergantungan impornya adalah industri kendaraan roda empat, menurun dari 60,8 persen pada tahun 2007 ke 34 persen pada tahun 2011. Industri manufaktur dengan ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor tentunya terpengaruh oleh terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sementara itu, industri yang cukup menjanjikan adalah industri komponen kendaraan karena 50,9 persen dari produknya diekspor ke pasar global.<sup>7</sup>

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 menyebabkan perlambatan kinerja ekonomi dunia dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang berimbas ke perekonomian domestik. Pemerintah dan Bank Indonesia senantiasa meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam mengelola kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Di sisi moneter, pelonggaran kebijakan moneter dibarengi dengan upaya penyempurnaan pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk menjaga kestabilan pasar uang domestik dan peluncuran serangkaian kebijakan, baik dari sisi pengelolaan permintaan maupun pasokan valuta asing. Kebijakan moneter secara konsisten dilakukan dengan mengacu kepada *Inflation Targeting Framework* (ITF). Pelaksanaan ITF tersebut dilakukan dengan tetap mengupayakan keseimbangan yang optimal antara mempertahankan kestabilan harga, menjaga ketenangan pasar keuangan, mengawal integritas sistem, dan menggairahkan sektor riil.<sup>8</sup>

## B. Teoritis

### 1. Teori Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pada dasarnya, kebijakan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Dalam perekonomian, beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter antara lain jumlah uang beredar (*money supply*), inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar uang, dan ekspektasi masyarakat.

Menurut Keynes, permintaan dan penawaran didapatkan dari suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi penawaran uang. Melalui instrumen dalam kebijakan moneter, pemerintah dapat meningkatkan penawaran uang. *Ceteris paribus*, peningkatan ini akan menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga tersebut, diharapkan penanaman modal akan bertambah dan akan meningkatkan pengeluaran atau output agregat. Sedangkan menurut pandangan klasik, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga, tetapi perubahan ini tidak menimbulkan efek terhadap tingkat produksi dan kegiatan ekonomi.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaannya, efektivitas kebijakan moneter tergantung pada hubungan antara jumlah uang beredar dengan variabel ekonomi utama seperti output dan inflasi. Dari sejumlah literatur, temuan utama yang menarik mengenai hubungan antara jumlah uang beredar, inflasi, dan output adalah bahwa dalam jangka panjang, hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi sangat tinggi atau memiliki hubungan erat. Sementara itu, hubungan antara pertumbuhan uang dan inflasi dengan pertumbuhan output riil mungkin mendekati nol atau hampir bisa dikatakan tidak memiliki hubungan. Temuan ini menunjukkan adanya suatu konsensus bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya berdampak pada inflasi, dan tidak banyak pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi riil. Terlepas dari perbedaan sudut pandang di atas, umumnya

kalangan praktisi maupun akademisi yakin bahwa dalam jangka pendek kebijakan moneter ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi yang berkepanjangan. Sebaliknya kebijakan moneter kontraktif dapat memperlambat laju inflasi yang umumnya terjadi pada saat kegiatan perekonomian sedang mengalami peningkatan. <sup>10</sup>

## **2. Kebijakan Moneter di Indonesia**

Sebagai bank sentral, bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum pada pasal 7 UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintahan. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. <sup>11</sup>

Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi kedepan masih

sesuai dengan sasaran inflasi yang dicanangkan. Dalam rangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI rate) yang diharapkan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. <sup>12</sup>

### **3. Studi Empiris**

Karena kebijakan makroekonomi merupakan faktor penting dari pertumbuhan ekonomi, maka banyak ekonom, peneliti maupun akademisi yang tertarik melakukan studi mengenai hubungan antara output dan kebijakan makroekonomi. Dalam menentukan faktor yang mendorong pertumbuhan output, telah dilakukan penelitian mengenai bagaimana instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga, defisit fiskal, investasi, dan nilai tukar, memengaruhi output. Karena sektor manufaktur mewakili porsi yang cukup besar dari kegiatan ekonomi dan pertumbuhan output manufaktur berhubungan erat dengan pertumbuhan output secara keseluruhan maka hasil dari beberapa studi empiris dari variabel makroekonomi terhadap output secara keseluruhan dapat dianggap sama atau mendekati dengan studi terhadap output manufaktur.

Vizek<sup>13</sup> menganalisis transmisi moneter di Kroasia menggunakan uji Granger Causality dan Error Correction Model (ECM). Vizek menguji pengaruh nilai tukar, suku bunga, dan money supply terhadap aktivitas riil ekonomi. Hasilnya disimpulkan bahwa kebijakan moneter memengaruhi output industri melalui perubahan yang terjadi pada nilai tukar dan money supply sedangkan sebaliknya perubahan suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap output industri.

Kemudian Tkalec dan Vizek<sup>14</sup> melakukan penelitian kembali untuk menganalisis dampak kebijakan makroekonomi terhadap produksi manufaktur di Kroasia pada tahun 2009. Dengan menggunakan multiple regressions ditentukan bagaimana konsumsi, investasi, suku bunga, nilai tukar riil, konsumsi pemerintah, defisit fiskal, dan foreign demand



memengaruhi output dari 22 sektor manufaktur. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan pada kondisi fiskal, nilai tukar riil, dan konsumsi lebih memengaruhi teknologi industri intensitas rendah.

*European Commission*<sup>15</sup> melakukan analisis untuk 25 negara *European Union* (EU). Studi ini menggunakan beberapa variabel di antaranya adalah fluktuasi PDB dan tenaga kerja, suku bunga, nilai tukar, pengeluaran pemerintah, tarif pajak perusahaan, perubahan harga relatif, konsumsi, investasi, ekspor, impor, dan intermediate demand. Hasilnya menunjukkan bahwa suku bunga riil memiliki hubungan negatif yang kuat terhadap pertumbuhan output manufaktur. Nilai tukar yang terapresiasi berpengaruh kecil terhadap output. Ekspor dan intermediate demand merupakan pendorong utama output manufaktur, sedangkan impor dan pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang sangat kecil terhadap pertumbuhan manufaktur.

Oktaviani et al<sup>18</sup> menguji dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap industri dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE). Hasilnya ditunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki dampak positif terhadap kinerja makroekonomi Indonesia yaitu perubahan PDB, investasi, konsumsi, dan tingkat pengembalian modal. Industri di Indonesia tidak terlalu merespon terhadap perubahan tingkat suku bunga yang mewakili kebijakan moneter. Hasil yang diperoleh memiliki gap pada model yang digunakan, hal ini dikarenakan model CGE bukan model terbaik untuk mengetahui hubungan antarvariabel.

Nneka B19 melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja kebijakan moneter terhadap kinerja indeks manufaktur di Nigeria pada periode tahun 1980-2009. Uji ekonometrika dilakukan untuk memeriksa dampak dari beberapa variabel makroekonomi terhadap indeks manufaktur. Hasil dari uji Vector Error Correction Model (VECM) yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai tukar dan money supply secara statistik signifikan memengaruhi indeks manufaktur. Sedangkan inflasi, tarif pajak penghasilan perusahaan, dan suku bunga pinjaman perusahaan

tidak signifikan secara statistik. Tidak ada hubungan yang jelas dalam jangka panjang antara variabel makroekonomi dengan indeks manufaktur pada periode sebelumnya ataupun periode berjalan. Hubungan positif antara money supply dan indeks manufaktur menunjukkan perlunya kebijakan moneter yang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan sektor manufaktur yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Nampewo et al<sup>20</sup> meneliti efek sektoral dari kebijakan moneter di Uganda pada periode tahun 1999-2011. Tepatnya adalah sektor-sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar kepada PDB Uganda. Sektor-sektor tersebut antara lain adalah pertanian, manufaktur, dan jasa. Pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan uji Granger Causality dan structural VAR. Hasilnya diperoleh bahwa nilai tukar merupakan jalur yang paling efektif mempengaruhi ketiga sektor tersebut. Tingkat suku bunga dan kredit bank relatif lemah mempengaruhi ketiga sektor tersebut, khususnya sektor manufaktur. Ketika nilai tukar terdepresiasi maka akan secara negatif mempengaruhi sektor manufaktur sedangkan terhadap sektor pertanian dan jasa berlaku sebaliknya.

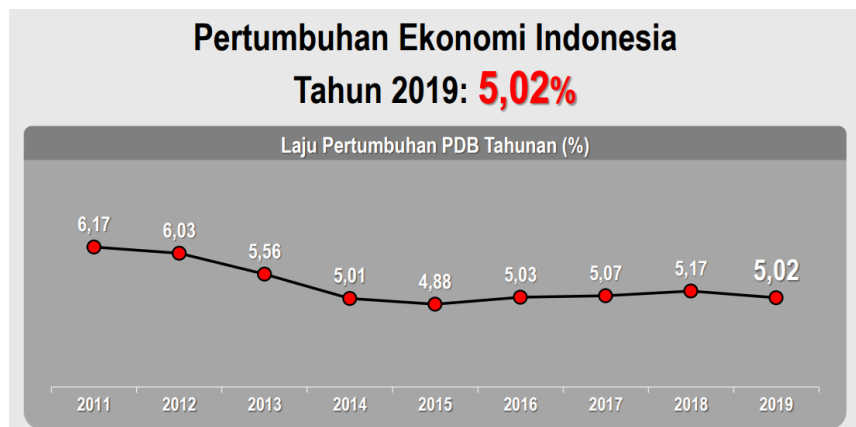
Seprillina dan Ismail<sup>21</sup> membahas mengenai bagaimana pengaruh instrumen kebijakan moneter yaitu jumlah uang beredar dan suku bunga SBI dalam mempengaruhi output yang diprosikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode kuartal pertama tahun 1999 sampai dengan kuartal kedua tahun 2012. Analisis yang digunakan adalah metode VECM. Hasil uji empiris membuktikan bahwa jumlah uang beredar dan suku bunga SBI dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan arah koefisien yang searah. Dalam jangka pendek, jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam jangka panjang memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan instrumen suku bunga SBI, dalam jangka pendek berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dari penelitian ini juga dibuktikan bahwa suku bunga SBI lebih efektif menstimulasi pertumbuhan ekonomi dibandingkan jumlah uang beredar.

Imoughele dan Ismaila<sup>22</sup> menguji dampak kebijakan moneter terhadap kinerja sektor manufaktur Nigeria selama periode tahun 1986-2012. Teknik ekonometrika untuk mengestimasi data antara lain uji unit root, uji Granger Causality, kointegrasi, dan model VAR. Variabel cadangan devisa, nilai tukar, dan inflasi secara statistik signifikan mempengaruhi output sektor manufaktur. Sedangkan money supply dan suku bunga secara statistik tidak signifikan mempengaruhi output sektor moneter pada tahun sebelumnya maupun tahun berjalan. Nilai tukar dan cadangan devisa berpengaruh negatif terhadap output sektor manufaktur sedangkan sebaliknya money supply dan inflasi berpengaruh positif. Hasil penelitian menunjukkan sektor moneter tidak signifikan berkontribusi terhadap perekonomian Nigeria. Karenanya, direkomendasikan otoritas moneter hendaknya membentuk dan menerapkan kebijakan moneter yang menjaga iklim investasi yang kondusif. Salah satunya dengan memberikan nilai tukar yang dapat menarik baik investasi domestik maupun asing di sektor manufaktur

### C. Pembahasan

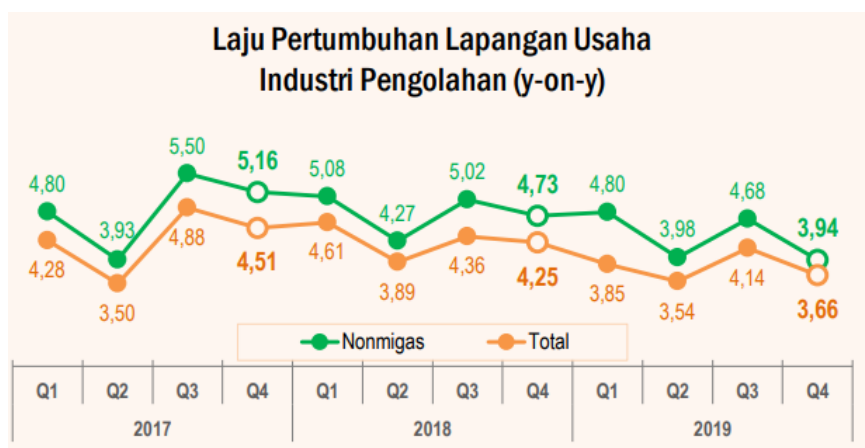
Industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan jasa industri dan pekerjaan perakitan (*assembling*).<sup>29</sup> Sektor industri manufaktur sebagai salah satu sektor andalan pembangunan nasional, selain memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), industri manufaktur juga memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja baru.

Dari perbandingan Gambar 1 dan 2 dapat dilihat bahwa perkembangan PDB manufaktur mengalami fluktuasi dengan perkembangan PDB nasional. Artinya kontribusi PDB manufaktur terhadap PDB nasional terjadi naik turun. Pertumbuhan PDB manufaktur terbesar terjadi pada tahun 2017 dalam kuartal ketiga yaitu sebesar 5,50 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

(Gambar 1 : Perkembangan PDB Nasional )



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

(Gambar 2 : Perkembangan PDB Manufaktur)

Dengan kontribusi hampir mencapai 30 persen terhadap PDB, menunjukkan industri manufaktur merupakan sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain besarnya pangsa ekspor pada industri manufaktur, penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur nonmigas juga menempati urutan atas sehingga membaik tidaknya kinerja sektor industri manufaktur mempunyai dampak nyata baik terhadap ekspor, penyerapan tenaga kerja maupun ekonomi secara keseluruhan.

Mengingat peran sektor industri yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, maka pembangunan sektor industri, khususnya industri pengolahan nonmigas menjadi agenda yang penting. Kebijakan

pembangunan industri nasional sejak tahun 1967 hingga saat ini telah mengalami berbagai perkembangan khususnya dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional maupun internasional yang menyertainya. Pada periode rehabilitasi dan stabilitasi (tahun 1967-1972), serta periode terjadinya *booming* minyak (tahun 1973-1981), kebijakan yang diterapkan adalah mendorong tumbuhnya industri substitusi impor, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT), kertas, semen, makanan dan minuman.<sup>30</sup>

Adapun langkah-langkah kebijakan yang diterapkan sejak tahun 1997 sampai tahun 2004 adalah melaksanakan Program Revitalisasi, Konsolidasi, dan Restrukturisasi Industri. Kebijakan ini ditempuh dengan tujuan untuk mengembalikan kinerja industri yang terpuruk akibat guncangan krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis multidimensi. Industri-industri yang direvitalisasi adalah industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja serta yang memiliki kemampuan ekspor.<sup>31</sup>

Perekonomian Indonesia sejak tahun 2000 mulai memasuki masa pemulihan setelah dilanda krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Pemulihan ekonomi berdasarkan pengalaman banyak negara dipercepat melalui dua faktor, yaitu melalui peningkatan konsumsi dalam negeri dan peningkatan ekspor. Strategi peningkatan ekspor yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara melakukan pembinaan industri, meningkatkan daya saing produk melalui program peningkatan Citra Merek Dagang, diversifikasi produk, serta pengembangan produk dan jasa. Dalam rangka peningkatan produksi industri manufaktur diperlukan bahan-bahan yang selama ini diimpor dari luar negeri. Untuk itu, negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur (ETT) menjadi alternatif sumber bahan-bahan tersebut dengan harga yang kompetitif. Dalam GBHN tahun 2000-2004 kebijakan makro diarahkan pada perekonomian berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat, serta mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka

meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasis keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Selanjutnya, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Ekonomi Nasional (Propenas) yang mengamanatkan bahwa dalam rangka memacu peningkatan daya saing global dirumuskan lima strategi utama, yaitu pengembangan ekspor, pengembangan industri, penguatan institusi pasar, pengembangan pariwisata dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>33</sup>

Kebijakan pembangunan industri tahun 2005-2009 adalah pada tingkat makro, menjaga stabilitas ekonomi makro, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang sehat dan berdaya saing serta pengelolaan persaingan usaha secara sehat. Koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta terus ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan. Pengembangan sektor industri manufaktur difokuskan pada pengembangan sejumlah sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Selain itu, pengembangan sektor industri manufaktur juga diarahkan lebih banyak pada upaya untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (*multiplier*) di masing-masing sub-sektor yang telah ditetapkan.<sup>34</sup>

Berdasarkan Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008, dalam rangka mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan di masa yang akan datang, maka pada tahun 2010-2014 KIN difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan daya saing perekonomian.<sup>35</sup> Adapun kriteria sub-sektor industri manufaktur yang diprioritaskan adalah sebagai berikut: (a) menyerap banyak tenaga kerja; (b) memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri (seperti makanan-minuman dan obat-obatan); (c) mengolah hasil pertanian dalam arti luas (termasuk perikanan) dan sumber-sumber daya

alam lain dalam negeri; dan (d) memiliki potensi pengembangan ekspor. Berdasarkan kriteria tersebut, maka industri manufaktur yang diprioritaskan antara lain industri makanan dan minuman; industri pengolah hasil laut; industri tekstil dan produk tekstil; industri alas kaki; industri kelapa sawit; industri barang kayu (termasuk rotan dan bambu); industri karet dan barang karet; industri *pulp* dan kertas; industri mesin listrik dan peralatan listrik; dan industri petrokimia.<sup>36</sup>

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Dari keempat variabel moneter yang digunakan (tingkat suku bunga SBI, *money supply*, nilai tukar, dan inflasi), hanya tingkat suku bunga SBI dan *money supply* yang signifikan berpengaruh terhadap PDB manufaktur. Hubungan positif antara *money supply* dan PDB manufaktur juga sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Begitu pula dengan pengaruh negatif tingkat suku bunga SBI terhadap PDB manufaktur, hasil ini juga didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Dari kedua variabel yang signifikan tersebut, *money supply* memiliki pengaruh paling besar terhadap PDB manufaktur di Indonesia. Artinya, pengendalian *money supply* akan sangat berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan PDB manufaktur. Selain itu, suku bunga SBI juga perlu dipertahankan ke tingkat yang rendah, karena dapat mendorong output manufaktur yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **2. Saran**

Hendaknya para pengambil kebijakan moneter (Bank Indonesia) memerhatikan perkembangan *money supply* dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pertumbuhan output industri manufaktur. Dalam mengambil kebijakan moneter, khususnya tingkat suku bunga SBI, perlu memerhatikan kondisi perekonomian. Karena hal itu dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. Selain itu perlu ditingkatkan koordinasi antara pengambil kebijakan moneter (Bank Indonesia) dan kebijakan fiskal (pemerintah) sehingga tercipta kondisi

perekonomian yang stabil dalam mendukung pertumbuhan industri nasional di Indonesia, khususnya industri manufaktur.

Pemerintah perlu memperbaiki struktur ekonomi nasional dengan mendorong industri manufaktur dalam negeri untuk memproduksi barang substitusi impor dan melakukan revitalisasi sektor industri manufaktur. Industri manufaktur berorientasi ekspor diperlukan untuk menggeser ekspor yang selama ini hanya mengandalkan komoditas yang rentan pada fluktuasi harga.

Selain itu perlu adanya perbaikan formulasi kebijakan oleh pemerintah yang dapat mendukung industri nasional, memberikan insentif bagi industri yang menciptakan nilai tambah, dan memperbaiki iklim investasi. Dalam hal ini DPR RI juga perlu melakukan pengawasan terkait kepastian hukum dan konsistensi penerapan Undang-Undang yang dapat mendorong pertumbuhan industri nasional khususnya industri manufaktur di Indonesia. Untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan kebijakan sektor riil, misalnya kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor, khususnya impor manufaktur. Kebijakan sektor riil diharapkan dapat mendorong output manufaktur yang pada akhirnya akan menciptakan perekonomian nasional menjadi lebih baik dan tahan dari guncangan krisis.

#### **E. Daftar Rujukan**

Arifin, Imamul dan Gina Hadi Wagiana. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo, 2009.

European Commission. "Sectoral Growth Drivers and Competitiveness in the European Union". Luxembourg: European Commission, 2009b.

Gujarati, Damodar. *Basic Econometrics*, Fifth Edition. New York: MacGraw-Hill Book Co., 2009.

Miskhin, Frederic S. *The Economics of Money Banking, and Financial Markets*, Tenth Edition. USA or Canada: Pearson Education International, 2012.

Nopirin. *Ekonomi Moneter Buku II*. Yogyakarta: BPFE, 2009.



Odedokun, Matthew O. *Financial Indicators and Economic Efficiency in Developing Countries*, dalam Niels Hermes and Robert Lensink, *Financial Development and Economic Growth: Theory and Experiences from Developing Countries*, London: Routledge Studies in Development Economics, 2013.

Rosadi, Dedi. *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2012.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. *Ilmu Makro Ekonomi*. Edisi ke-17 Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2004.

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi ke-3*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Warjiyo, Perry dan Solikin. *Kebijakan Moeter di Indonesia*. Jakarta: PSK BI, 2003 dalam Umi Khalsum, 2011.

Widarjono, Agus. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.

“Pengaruh Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara”. (<http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=124892>, diakses 1 April 2020).

Oktaviani, Rina, Tony Irawan, and Lukytawati Anggraeni. “The Impact of Fiscal and Monetary Policy on Industry and Indonesian Economy: A Computable General Equilibrium Analysis”. *International Journal of Economics and Management*, 3(6), 2010, pp. 34-52.

Bank Indonesia. “Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014”. Edisi Januari 2009.

“Ancaman dan Tantangan Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)”. (<http://m.kompasiana.com/post/read/611371/1/ancaman-dan-tantangan-indonesia-dalam-menghadapi-asean-economic-community-aec.html>, diakses 31 Maret 2020).

“Potret Industri Manufaktur Indonesia Sebelum dan Pasca Krisis”. (<http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/edef-konten-view.asp?id=20100512092358863386920>, diakses 29 Maret 2020).

“Industri Manufaktur Jelang AEC 2015”.  
(<http://www.investor.co.id/opini/industri-manufaktur-jelang-aec-2015/75932>, diakses 2 April 2020).

“Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia”.  
(<http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.aspx>, diakses 2 April 2020).

“Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia”.  
(<http://www.bi.go.id/id/moneter/kerangka-kebijakan/Contents/Default.aspx>, diakses 2 April 2020).

“Kebijakan Industri Nasional”.  
([http://rocana.kemenperin.go.id/phocadownload/Forkom\\_fungsional/kebijakan%20industri%20nasional%20-%20karocana.pdf](http://rocana.kemenperin.go.id/phocadownload/Forkom_fungsional/kebijakan%20industri%20nasional%20-%20karocana.pdf), diakses 2 April 2020).

Tkalec, Marina and Maruška Vizek. “The Impact of Macroeconomic Policies on Manufacturing Production in Croatia”. *Privredna Kretanja i Ekonomika Politika*, 121, 2009, pp. 61-92.

Vizek, Maruška. “Econometric Analysis of Monetary Transmission Channels in Croatia”. *Privredna Kretanja i Ekonomska Politika*, 109(16), 2006, pp. 28-61.

